

Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan DiKelurahan Jambangan Kota Surabaya

Vrisca Ariestia

S1 Ilmu Administrasi Publik, FIS, UNESA (vrisca_nabila@yahoo.co.id)

Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP

ABSTRAK

Kemiskinan telah menjadi faktor penyebab terjadinya masalah sosial yang menimpa masyarakat. Untuk itu, perlu dibuat suatu badan khusus untuk menangani program penanggulangan kemiskinan tersebut. Maka dari itu, dibentuklah lembaga kepemimpinan masyarakat yang dipercaya disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang diharap mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dikelurahan jambangan kota Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah pengurus BKM yaitu ketua koordinator, anggota kesekretariatan, kepala unit pengelola keuangan, kepala unit pengelola sosial, kepala unit pengelola lingkungan, serta anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang merupakan kelompok masyarakat sasaran program ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengorganisasian warga secara partisipatif yang dilakukan BKM membawa dampak positif terhadap masyarakat, (2) sebagai dewan pengambilan keputusan dalam penanggulangan kemiskinan BKM melakukan secara kolektif dengan jalan musyawarah, (3) keputusan yang diambil BKM selalu mengedepankan nilai-nilai luhur yaitu kejujuran, keadilan, transparan, dan demokratis, (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan, (5) dalam mengembangkan jaringan, BKM bekerjasama dengan masyarakat, aparaturn kelurahan dan dengan pemerintah daerah/kota, (6) dalam menetapkan kebijakan dan pemanfaatan dana BLM yang dilakukan BKM dengan mengalokasikan dana tersebut kedalam tiga bidang pembangunan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Kesimpulannya adalah semua peran yang dilakukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tidak lepas sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Dari pengorganisasian, proses pengambilan keputusan, nilai-nilai yang ditanamkan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan jaringan dan pemanfaatan dana BLM sebagai upaya yang diinginkan masyarakat melalui program-program BKM. Diharapkan seluruh anggota BKM Amanah Jambangan lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan keterampilan bagi masyarakat. Memaksimalkan peran BKM dalam mengembangkan jaringan agar menambah kemajuan diwilayahnya. Guna mengatasi pinjaman macet maka BKM sebaiknya melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap KSM.

Kata kunci :Peran, Badan Keswadayaan Masyarakat, penanggulangan kemiskinan.

ABSTRACT

Poverty has been a factor contributing to the social problems of society befall. For that, it needs to be made suatu specialized agency for the poverty prevention program. Therefore, the established institutions of society that believed leadership called Community Self-reliance Agency (BKM) is expected to become a place voice struggles of the poor in their aspirations and needs. This study aims to describe the role of the Community Self-reliance in poverty reduction The village vase Surabaya.

The method used is descriptive qualitative approach. The speaker of this study is that the chairman of the board BKM coordinator, member of the secretariat, financial management unit head, the head of social management unit, the head of environmental management unit, as well as members of self-help groups (SHGs) who are the target of this programs. Data collection techniques used in the form of in-depth interviews, observation, documentation. Data analysis was done with the process of data collection, data reduction, data presentation, and withdrawal conclusion.

The results of this study indicate that (1) organizing participatory citizens who do BKM have a positive impact on society, (2) a council decision in poverty reduction BKM do collectively by way of consultation, (3) the decision taken BKM always puts the value-core values of honesty, fairness, transparency, and democratic, (4) poor enforcement activities by conducting training, (5) in developing tissues, BKM in collaboration with communities, village officials and the pemerintah area/city, (6) in setting policy and utilization BKM BLM conducted by allocating these funds into three areas of development that is environmentally, socially and economically. The conclusion was that all roles undertaken Agency Community Self-reliance (BKM) can not be separated in an effort to empower people in poverty reduction. From

organizing, decision-making process, the values instilled, community development, network development and utilization of BLM as a desirable community through programs BKM. It is expected that all members of Aamanah Jambangan BKM more creative and innovative in providing skills for the community. Maximizing BKM role in developing the network in order to increase the progress of territory. To address the non-performing loans of BKM should pass scrutiny and assistance to SHGs.

Keywords: Roles, Agency Community Self-reliance, poverty reduction.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kemiskinan dapat terjadi di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Kemiskinan di perkotaan pada umumnya memperlihatkan ciri-ciri masyarakat miskin yang tinggal saling berdekatan dan membentuk sebuah pemukiman sendiri. Pemukiman mereka saling dibangun di atas areal ilegal atau tidak sah, karena lokasi yang dipakai bukan tanah milik mereka sendiri. Keberadaan mereka tidak jarang mengganggu tempat-tempat umum, seperti di pinggir rel kereta api dan dibawah kolong jembatan. Bahkan Suharto (2009: 132) menambahkan bahwa masyarakat miskin sendiri tidak hanya orang-orang yang tinggal di pemukiman seperti itu, akan tetapi para gelandangan, pengemis, pengamen, anak jalanan, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, dan kelompok merjinal termasuk dalam kemiskinan.

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk menjadi sebuah target utama dalam suatu pemerintahan. Berbagai strategi dilakukan untuk mencapai target tersebut diantaranya mengurangi kemiskinan. Badan Pusat Statistik menyatakan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.

Tabel 1.1

Garis kemiskinan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin di indonesia menurut provinsi tahun 2013

No	Provinsi	Kemiskinan tahun 2013		
		Garis Kemiskinan (Rp)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (000)
1	DKI Jakarta	434.322	3.72	375.70
2	Jawa Barat	276.825	9.61	4382.65
3	Jawa tengah	261.881	14.44	4704.87
4	Jawa timur	273.758	12.73	4865.82
5	Yogyakarta	303.843	15.03	535.18

Tabel di atas merupakan Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Pada Maret 2012 sampai Maret 2013 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur berkurang. Pada Maret 2012, jumlah masyarakat miskin di Jawa Timur adalah sebanyak 5.071.000 jiwa atau 13,40% masyarakat kota sebesar 1.630.600 jiwa atau 9,06% dan masyarakat desa 3.440.300 jiwa atau 17,35%, sedangkan pada bulan Maret 2013 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 4.771.260 jiwa atau 12,55% dengan rincian masyarakat kota 1.550.460 jiwa atau 8,57% dan masyarakat desa sebesar 3.220.800 jiwa atau 16,15%. Menurut data diatas dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Jawa timur mengalami penurunan dari jumlah pada Maret 2012 sebesar 5.071.000 menjadi 4.771.260 bulan Maret 2013. (<http://www.bps.go.id>).

Data kemiskinan di kota Surabaya tahun 2011 menurut perhitungan badan statistik menunjukkan presentase penduduk miskin tertinggi di antara kabupaten/kota di Jawa Timur yaitu sebesar 183.3 Ribu Orang sehingga dapat di tunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Garis kemiskinan, persentase penduduk
miskin dan jumlah penduduk miskin
Provinsi Jawa Timur menurut
Kabupaten/Kota tahun 2011

No	Kabupaten / Kota	Kemiskinan Tahun 2011		
		Garis kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (000) Ribu Orang	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	Pacitan	193.180	98.7	18.13
2	Ponorogo	210.411	105.9	12.29
3	Kediri	218.865	218.1	14.44
4	Malang	215.605	287.4	11.67
5	Sidoarjo	277.776	136.3	6.97
6	Mojokerto	240.502	117.5	11.38
7	Lamongan	242.441	206.7	17.41
8	Gresik	285.519	181.7	15.33
9	Jombang	251.704	156.0	12.88
10	Lumajang	202.773	131.9	13.01
Kota				
1	Blitar	257.685	9.5	7.12
2	Probolinggo	425.583	38.8	17.74
3	Pasuruan	269.543	15.7	8.39
4	Madiun	260.179	9.7	5.66
5	Surabaya	310.074	183.3	6.58

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Salah satu upaya mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Pada dasarnya PNPM-MP sudah ada pada tahun 1999 yang biasanya disebut dengan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Program ini di buat untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capita*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penaggulangan kemiskinan (PJM PRONANGKIS) yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah dan kelompok peduli setempat.

Salah satu Lembaga yang berperan dalam pelaku kebijakan tersebut adalah Badan Keswadayaan Masyarakat atau dapat di singkat (BKM). Tujuan didirikannya BKM adalah ketika masyarakat melihat kemiskinan sebagai persoalan bersama yang harus ditanggung bersama sehingga diperlukan lembaga pimpinan yang mampu mengendalikan gerakan bersama tersebut, serta untuk dapat memimpin gerakan penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai upaya bersama. Sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan serta kedudukannya di kelurahan, sebagai lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan, yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga. BKM sendiri ada tiga bidang yang ditanganinya yaitu UPL (Unit Pengelola Lingkungan) seperti pavingisasi, pembuatan MCK, pembersihan selokan air dsb, UPK (Unit Pengelola Keuangan) seperti mengelola keuangan dan akuntan, serta UPS (unit pengelola sosial) seperti penghasil produk-produk untuk dipasarkan sendiri.

Penelitian ini mengambil Lokasi di Kantor Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Amanah, Kelurahan Jambangan Kota Surabaya. Kelurahan Jambangan adalah salah satu kelurahan yang mendapatkan bantuan dari PNPM-Mandiri Perkotaan. Sejak tahun 2007 kelurahan jambangan mendapatkan bantuan berupa perbaikan dan pembangunan selokan, pemavingan jalan, rehap rumah tidak layak huni, pengadaan rombongan dan masih banyak lagi yang lainnya melalui BKM Amanah Jambangan. Segala bantuan yang di berikan BKM Amanah jambangan bersumber dari Pusat, Pemerintah Kab/kota, Pemerintah kelurahan, Swadaya Masyarakat dan atau dari sumber lain yang sah. Berikut merupakan tabel dana pertahun yang di terima BKM Amanah Jambangan.

Tabel 1.3
Dana Penerima Bantuan Langsung
Masyarakat BKM Amanah jambangan
2011-2013

Tahun	Daftar Usulan Dana Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLT)	Jumlah Dana Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLT)
2011	100 juta rupiah	70 juta rupiah
2012	100 juta rupiah	70 juta rupiah

2013	150 juta rupiah	75 juta rupiah
------	--------------------	----------------

Sumber data :Laporan Bendahara BKM Amanah jambangan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran badan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahan jambangan kota Surabaya.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan diatas, maka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Amanah dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahan jambangan surabaya kota Surabaya?
2. Bagaimana kendala atau hambatan bagi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Amanah dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahan jambangan kota surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Mendeskripsikan Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahan jambangan surabaya.
2. Mendeskripsikan kendala atau hambatan bagi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Amanah dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahan jambangan kota surabaya?

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini dan diharapkan dapat memberikan manfaat pada semua pihak antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Melalui penelitian ini, diharapkan akan mempunyai implikasi teoritis terhadap Studi Administrasi Negara , khususnya pada masalah pembangunan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan/referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kasus yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa
Mahasiswa sebagai media pembelajaran untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah secara

langsung kedalam kegiatan penelitian dilapangan.Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahan jambangan surabaya serta.

- b. Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Adapun manfaat khusus bagi pemerintah kota Surabaya adalah diharapkan mampu memberikan masukan khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, sehingga dapat mengurangi kemiskinan di kota Surabaya.

- c. Bagi BKM Amanah Jambangan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta masukan untuk meningkatkan peran badan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahan jambangan kota surabaya.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Masalah Kemiskinan merupakan isu sentral di negara indonesia terutama setelah Indonesia dilanda krisis multidimensional. Definisi umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksebilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, kesehatan dan fasilitas hidup lainnya sehingga setiap aktivitas maupun usahanya menjadi sangat terbatas (Sulistyani dalam , 2007:45).

Pengertian tentang kemiskinan secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.

Kemiskinan pada dasarnya adalah situasi dimana serba kurang yang dialami oleh individu. Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial mendefinisikan (2002:3-4) kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Definisi mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu, walau demikian kemiskinan selalu berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikelsen, 2003:194)

2. Ciri-Ciri Kemiskinan

Menurut (suyanto,2005:4) Dengan melihat banyaknya ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang atau sekelompok orang disebut miskin atau tidak miskin, maka umumnya para ahli akan merasa kesulitan dalam mengklasifikasikan masyarakat menurut garis kemiskinan. Namun, dari berbagai studi yang ada, pada dasarnya ada beberapa ciri dari kemiskinan, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan.
- b. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
- c. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar.
- d. Banyak diantara mereka yang tinggal di daerah pedesaan, dan tidak mempunyai tanah garapan, atau kalaupun ada relatif kecil sekali.
- e. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih muda dan tidak mempunyai keterampilan atau *skill* dan pendidikan.

3. Akar Penyebab Kemiskinan

Menurut (Suyanto,2005:7) Akar penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Kedua, kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.

Berbeda dengan perspektif modernisasi yang cenderung memvonis kemiskinan bersumber dari lemahnya etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras, kemiskinan buatan dalam perbincangan di kalangan ilmuwan sosial acap kali diidentikkan dengan pengertian kemiskinan struktural. Yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

4. Dampak Kemiskinan

Menurut (Suyanto,2005: 158) Akibat dari situasi krisis dan kemiskinan yang tak segera tertangani antara lain adalah:

- a. Tingginya beban sosial ekonomi yang harus ditanggung masyarakat,
- b. Rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia,

- c. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan,
- d. Menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
- e. Menurunnya kepercayaan masyarakat pada birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan
- f. Kemungkinan terjadinya kemerosotan mutu generasi yang akan datang.

5. Kemiskinan di Perkotaan

Menurut (Suyanto,2005:159) Di berbagai kota besar, persoalan penanggulangan kemiskinan menjadi lebih sulit terealisasi, karena pertumbuhan kota yang terlalu ekspansif sering tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi guna memberikan kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial bagi penduduk yang bertambah cepat.

Pengalaman selama ini telah menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang hanya mengutamakan kota besar sering menimbulkan implikasi sosial yang kontraproduktif. Pertama, pola pembangunan yang mengutamakan daerah kota atau pusat-pusat pertumbuhan hanya akan meningkatkan daya tarik bagi penduduk dari daerah pedesaan untuk berpindah, baik secara tetap maupun musiman, sehingga terjadilah urbanisasi berlebih (*over urbanization*). Kedua, pembangunan di kota kenyataannya membutuhkan dana yang sangat besar, tetapi hasilnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk saja, sehingga yang terjadi kemudian adalah kota muncul dalam sosoknya yang kontradiktif dan ambivalen. Ketiga, pembangunan kota yang tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup telah meningkatkan jumlah pengangguran yang umumnya karena berpendidikan rendah menyebabkan mereka tidak bisa terserap di sektor perekonomian formal kota. Kalangan penduduk semacam inilah yang umumnya potensial berkembang menjadi masalah sosial tersendiri karena kemiskinan yang mereka derita.

6. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Menurut (Suyanto,2005:17) Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat miskin di kota Surabaya sesungguhnya bukan hanya mencakup upaya pengembangan kegiatan produktif keluarga miskin, tetapi juga menyangkut pada persoalan bagaimana upaya pemberdayaan yang dilakukan dapat menjamin para keluarga miskin memperoleh apa yang sebetulnya menjadi hak mereka, khususnya kesejahteraan dan taraf kehidupan yang layak.

Sebagai salah satu alternatif dan mungkin juga dapat dilakukan secara bersamaan, pola lain yang dapat dilaksanakan untuk mengembangkan usaha kecil adalah dengan cara melakukan efisiensi proses

produksi. Ketiga, mempertajam fokus kelompok sasaran program penanggulangan kemiskinan. Keempat, meningkatkan peran lembaga-lembaga lokal dan kelompok sekunder di masyarakat dalam upaya monitoring dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan yang memiliki ciri multidimensional akan memerlukan banyak pihak yang memiliki kemampuan dan kemauan. Menurut Sumodiningrat dalam Sujono (2007:48), langkah awal dalam pengentasan kemiskinan adalah mengenali pokok permasalahan yang dihadapi, tantangan dan kendala yang ada, serta peluang yang tersedia. Cara yang paling populer dilakukan saat ini adalah dengan pendekatan pemberdayaan (*empowering*).

B. Peran NGO/LSM

LSM atau yang umum dikenal dengan organisasi non-pemerintah (*non government organization*) merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan yang bersifat mandiri. Organisasi seperti ini tidak menggantungkan diri pada pemerintah, pada negara, terutama dalam dukungan finansial dan sarana/ prasarana. Sekalipun mendapatkan dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional, tidak berarti kalangan NGO/LSM sama sekali terlepas dari pemerintah, karena tidak jarang pemerintah memberikan fasilitas penopang, misalnya dengan adanya pembebasan pajak untuk aktivitas dan aset yang dimiliki oleh NGO (Riker, dalam Heyzer ad Quizon, 1995:30). Harus pula dicatat, bahwa ada sejumlah LSM yang tumbuh dan bergerak dalam masyarakat. Tapi, lembaga-lembaga tersebut sangat sulit dilepaskan dari pemerintah, karena tidak jarang lembaga tersebut didirikan oleh aparat pemerintah Atau langsung atau tidak, mempunyai kaitan dengan kepentingan pemerintah, seperti organisasi wanita, Dharma Pertiwi dan lain-lain. Dalam organisasi-organisasi seperti itu tidak dimasukkan sebagai bagian dari analisis. Kerena, peranannya sebagai agen perubahan menuju demokratisasi sangatlah terbatas. Bahkan tidak jarang mereka justru menjadi lembaga yang merupakan sarana mobilisasi politik untuk kepentingan pemerintah.

Kehadiran NGO/LSM dalam sebuah masyarakat merupakan kenyataan yang tidak dapat dinafikan. Hal itu terjadi karena, bagaimanapun juga, kapasitas pemerintah terbatas. Tidak semua kebutuhan warga masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah, apalagi di negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Karena keterbatasan itu, pemerintah tidak jarang mengambil langkah tertentu untuk melakukan penghematan (Riker, dalam Heyzer, Ryker, and Quizon, 1995:16). Lain dari itu, bukan hal yang aneh kalau NGO/LSM merupakan *The Best Provider* atau penyelia yang terbaik. Sebetuk kegiatan pelayanan tidak jarang akan lebih efisien dan efektif kalau dilakukan oleh NGO/LSM ketimbang dilakukan oleh pemerintah.

Namun demikian, tidak jarang pula NGO/LSM menjadi pesaing. Bahkan penentang pemerintah untuk hal-hal tertentu. Terutama, agenda publik tertentu yang oleh kalangan masyarakat dianggap penting tetapi tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah. Misalnya, dalam penentuan proyek-proyek pembangunan.

LSM memainkan berbagai macam peranan dalam proses pembangunan sebuah negara. Noleen Heyzer (dalam Heyzer, Ryker, and Quizon, 1995:8) mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dapat dimainkan oleh berbagai NGO, yaitu :

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat "grassroots", yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Sementara itu, Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna (dalam Tadashi Yamono, 1995: 129-130) mengungkapkan hal yang hampir sama, dengan sedikit menekankan pada dimensi politik. Mereka mengidentifikasi empat peranan yang dimainkan oleh kalangan NGO dalam sebuah negara, antara lain :

1. Katalisasi perubahan sistem, hal ini dilakukan dengan jalan mengangkat sejumlah masalah yang penting dalam masyarakat, membentuk kesadaran global, membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demi perubahan kebijaksanaan negara, mengembangkan kemampuan politik rakyat, dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat.
2. Memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, bahkan bila melakukan protes. Hal ini dilakukan karena bisa saja terjadi penyalagunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, terutama yang dilakukan oleh pejabat negara dan kalangan business.
3. Memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan. Hal ini dilakukan karena tidak jarang warga masyarakat menjadi korban kekerasan itu, kalangan NGO muncul secara aktif untuk melakukan pembelaan bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan.
4. Implementasi program pelayanan. NGO dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat.

C. Tinjauan Umum Mengenai Badan Keswadayaan Masyarakat atau disingkat (BKM)

1. Definisi Badan Keswadayaan Masyarakat

Badan keswadayaan masyarakat, merupakan dewan atau majelis kolektif masyarakat warga tingkat kelurahan yang dibangun secara sadar oleh warga untuk

- mengatasi persoalan yang dihadapi bersama, menggalang potensi, khususnya masalah kemiskinan yang mengedepankan nilai-nilai luhur (moralitas) dan berupaya untuk bersinergi dan membangun saling percaya diantara masyarakat sendiri maupun dengan pihak luar, dan mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan, termasuk kerjasama dengan pihak luar dengan memposisikan diri di luar lembaga pemerintah, agama, keluarga, militer serta usaha (sumber: Pedoman Umum PNPM Mandiri)
2. Ciri-ciri Badan Keswadayaan Masyarakat
 - a. Bukan lembaga yang dibentuk secara otomatis
 - b. Kewenangan dan kelembagaan bersumber dari masyarakat setempat.
 - c. Sebagai lembaga kolektif.
 - d. Pengambilan keputusan di ambil secara kolektif, demokratis, transparan dan akuntabel.
 - e. Diterima, berfungsi dan berakar diseluruh lapisan masyarakat.
 - f. Mekanisme pemilihan anggota dilakukan secara langsung.
 - g. Syarat keanggotaan BKM pada dasarnya merupakan perwujudan dan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan yang disepakati masyarakat setempat.
 - h. Dibentuk secara partisipatif, demokratis dan inklusif
 - i. Bekerja secara kolektif, demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel.
 - j. Mampu mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap institusi pemerintah, politik militer, agama, usaha dan keluarga. (sumber: Pedoman Umum PNPM Mandiri)
 3. Tugas dan Fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat
 - a. Tugas pokok Badan Kswadayaan Masyarakat :
 - 1) Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan serta aturan mainnya (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif.
 - 2) Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan rencana program penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis)
 - 3) Memonitor, mengawasi dan mengendalian pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh BKM, termasuk penggunaan dana BLM
 - 4) Mendorong proses berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalan ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi.
 - b. Fungsi pokok Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berdasarkan (Pedoman Buku PNPM Mandiri perkotaan, 2010)
 - 1) Pusat penggerak dan penumbuhan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan nyata masyarakat setempat.
 - 2) Pusat pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, kesempatan bersama).
 - 3) Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis.
 4. Unit pelaksanaan Tugas Badan Keswadayaan Masyarakat dalam (buku Pedoman PNPM Mandiri Pekotaan, 2010)
 - a. Unit Pengelola Keuangan (UPK), kegiatan ini untuk mengelola kegiatan seperti:
 - 1) Pengembangan program perekonomian warga.
 - 2) Sistem informasi data ekonomi warga.
 - 3) Pengelola Pinjaman bergulir untuk usaha produktif kepada Kelompok Swadaya Masyarakat.
 - 4) Pencatatan Pembukuan
 - 5) Mendampingi pembentukan dan penyusunan usulan Kelompok Swadaya masyarakat DLL.
 - b. Unit Pengelola Lingkungan (UPL), untuk mengelola kegiatan yang terkait dengan lingkungan seperti pavingisasi, pembangunan/ perbaikan saluran, neonisasi/penerangan jalan dan sebagainya dan juga selain itu kegiatan UPL ini adalah :
 - 1) Penyusunan program pengembangan kawasan pemukiman
 - 2) Sisten informasi data pemukiman dan perumahan warga.
 - 3) Pencatatan pembukuan.
 - 4) Mendampingi pembentukan dan penyusunan usulan Kelompok Swadaya Masyarakat/ panitia.
 - 5) Verifikasi dan penyaluran dana kepada Kelompok Swadaya Masyarakat/ Panitia.
 - c. Unit Pengelola Sosial (UPS), meliputi beberapa kegiatan yang mengutamakan pembangunan sumber daya manusia terutama pada kelompok keluarga miskin lewat pemberdayaan yaitu pelatihan,

pengembangan, kapasitas organisasi, penyiapan peluang, usaha, sampai dengan penyediaan bahan dan barang usaha termasuk rombongan sampai dengan pasar untuk penyaluran produk, pemasangan saluran air bersih / PDAM bagi masyarakat yang sangat membutuhkan air bersih. Selain kegiatan UPS diatas masih banyak lagi yaitu:

- 1) Pengembangan program Sosial kemasyarakatan.
- 2) Sistem Informasi data potensi dan masalah sosial.
- 3) Pencatatan pembukuan.
- 4) Mendampingi pembentukan dan penyusunan usulan.
- 5) Verifikasi dan penyaluran dana kepada Panitia/ Kelompok Swadaya Masyarakat.
- 6) Pengelola dana sosial (santunan, pasar murah, kesehatan, pendidikan bencana alam, kematian dll) bersama panitia / KSM.
- 7) Menghimpun dana simpanan untuk kegiatan Aqiqoh, Qurban dan lain-lain.
- 8) Membangun *Channeling* dan kemitraan dengan pemerintah dan pihak lain.

D. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan

BKM bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya. Oleh sebab itu Peran utama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan (buku pedoman PNPM-MP, 2010) adalah sebagai berikut :

1. Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3tahun) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan dana Bantuan Langsung Masyarakat.
2. Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya ditingkat komunitas.
3. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
4. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Mengembangkan jaringan BKM di tingkat kecamatan kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk

menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang di wakilinya.

6. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana menurut Nasution dalam Sugiyono (2010: 205) menyatakan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsir mereka tentang dunia sekitarnya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Alasan menggunakan metode kualitatif, karena meneliti Peran Badan keswadayaan masyarakat (BKM) AMANAH dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Jambangan Surabaya. Pada penelitian ini dilakukan penggalian data dengan mengamati dan mendengarkan secara seksama setiap penuturan informan yang berkaitan.

B. FOKUS PENELITIAN

Penelitian fokuskan pada pendeskripsian peran badan keswadayaan masyarakat (BKM) dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahan jambangan kota surabaya, BKM sendiri merupakan dewan atau majelis kolektif masyarakat warga tingkat kelurahan yang dibangun secara sadar oleh masyarakat untuk mengatasi persoalan bersama khususnya masalah kemiskinan. Guna membatasi studi yang berkaitan dengan penelitian, maka penulis menetapkan fokus penelitian berdasarkan :

1. Mengorganisasikan warga secara partisipatif. BKM bersama warga membentuk kesepakatan bersama untuk bersatu sebagai sesama masyarakat warga disuatu kelurahan untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Dalam hal ini BKM bersama relawan dan warga peduli bersama-sama merumuskan rencana program penanggulangan kemiskinan (PJM-Pronangkis)
2. Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri. Sebagai contohnya BKM bertugas memutuskan proposal mana yang akan diprioritaskan didanai oleh dana PNPM setelah dilakukan penilaian oleh unit-unit pelaksana.
3. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur. Dalam setiap kebijakan yang diambil oleh BKM harus dipertimbangkan secara matang dengan mengedepankan nilai keadilan, jujur, transparan itu BKM harus menyebarluaskan keputusan yang diambil kepada masyarakat melalui papan informasi yang telah disediakan.

Keputusan yang diambil itu harus demokratis atas kesepakatan seluruh anggota dan dilaksanakan secara jujur dan adil.

4. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam hal ini BKM mengadakan pelatihan-pelatihan misalnya mengadakan les menjahit, les komputer dll. Agar masyarakat mempunyai keterampilan untuk meningkatkan pendapat mereka.
5. Mengembangkan jaringan BKM. Hal ini BKM membangun *Channeling* dengan pemerintah kecamatan kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya.
6. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat, yang sehari-hari dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan.

C. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Amanah, Kelurahan Jambangan kota Surabaya. Alasan memilih lokasi ini karena kelurahan jambangan ini telah banyak wujud dari pengimplementasian PNPM Mandiri Perkotaan yang hasilnya di bidang lingkungan, sosial dan ekonomi seperti pemasangan paving, perbaikan rumah, pemberian rombongan dan modal usaha. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahan Jambangan ini dilaksanakan BKM Amanah dengan masyarakat sekitar kelurahan jambangan sebagai pemberi dukungan dalam pencapaian tujuan program.

D. Data Dan Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif mengandalkan data berupa kata-kata atau teks, gambar, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (John W. Creswell, 2009: 258). Kata-kata dan tindakan dari yang diamati, atau diwawancarai dan terdokumentasi merupakan sumber data utama dan dicatat melalui catatan tertulis dan juga pengambilan foto. Oleh karena itu, data pada penelitian ini berupa paparan lisan, tertulis, dan perbuatan yang menggambarkan. Data penelitian akan terwujud dalam Peran badan keswadayaan masyarakat (BKM) Amanah Dalam penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Dikelurahan Jambangan Surabaya. tertulis atau dokumen, pernyataan lisan (gagasan, persepsi, dan latar belakang) dari para informan. Sumber data merupakan subyek dari mana data-data tersebut diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi data.:

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh informan secara langsung dengan cara observasi dan wawancara. Data primer merupakan narasumber utama. Narasumber adalah orang-orang yang benar-benar tahu dan

terlibat dengan implementasi kebijakan yang sedang dijalankan. Pemilihan informan atau narasumber sebagai sumber data atau informan dalam penelitian ini, berdasarkan asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Pemilihan informan ditentukan oleh peneliti disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Adapun informan yang digunakan sebagai narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Koordinator BKM Amanah Bapak Rinto Eko. S
- b. Anggota Unit Pengelola Sosial (UPS) BKM Amanah Bapak Agus Adiando
- c. Anggota Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Amanah Ibu Nur Isaroh
- d. Anggota Unit Pengelola Sosial (UPS) BKM Amanah Ibu Sudarni
- e. Anggota kesekretariat BKM Amanah Bapak Mudjiono
- f. Ketua KSM "Cantik" Ibu Indah Nur Hayati sebagai masyarakat penerima dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)
- g. Warga kelurahan jambangan tertentu, orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat beberapa literatur, antara lain: catatan, buku, dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Data sekunder berupa dokumen dan data dari RW jambangan terkait perkembangan masyarakat sebelum dan sesudah adanya program ini sangat berguna untuk mendukung sumber data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui wawancara, angket, dan observasi.

1. Wawancara (*interview*)

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam (*indepth interview*) akan dilakukan kepada sejumlah informan. Wawancara mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-bercakap berhadapan dengan informan. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang subjek penelitian serta pendirian-pendirian mereka yang merupakan pembantu utama metode observasi. Dipilihnya metode

wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk :

- a. Memperoleh keterangan yang sedalam-dalamnya tentang bagaimana peran badan keswadayaan masyarakat (BKM) dalam penanggulangan kemiskinan dikelurahan jambangan sehingga memperoleh informasi dengan cepat dan langsung dari informan
- b. Memperoleh jawaban yang valid berdasarkan mimik, emosi informan saat memberikan informasi atau pendapat
- c. Memperoleh jawaban yang akurat karena apabila ada salah penafsiran dari informan, peneliti bisa langsung memperbaiki atau meluruskan yang dimaksud oleh peneliti.

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara tidak terstruktur. Dimana peneliti hanya memasukkan inti dari apa yang akan diwawancarakan sebagai pedoman wawancara.

2. Observasi

Guna mempermudah pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Observasi biasanya dapat digunakan untuk mengamati tingkah laku yang aktual. Dalam penelitian ini tipe observasi yang dipergunakan adalah tipe *participant as observer* yaitu memberitahukan maksud peneliti kepada kelompok yang diteliti. Sebagai mana yang dinyatakan Sugiyono (2011:228) observasi terus terang merupakan teknik pengumpulan data dengan menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi narasumber akan tahu bahwa aktivitas-aktivitas peneliti mulai awal sampai akhir penelitian.

Dipilihnya teknik observasi sebagai salah satu teknik dalam pengumpulan data dikarenakan:

- a. Dengan observasi di lapangan akan dapat diperoleh gambaran atau informasi yang holistik tentang peran badan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dikelurahan jambangan surabaya. Melalui observasi akan didapat data yang kurang atau tidak akan terungkap dalam wawancara
- b. Observasi akan memberikan temuan data tentang hal-hal yang tidak terungkap oleh informan dalam wawancara karena bersifat sensitif

Dengan demikian dalam penelitian ini, selain menggunakan wawancara tidak terstruktur, peneliti juga menggunakan teknik pengambilan data dengan observasi terus terang.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai

pelengkap yaitu teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011:240) hasil penelitian observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa lalu. Dokumentasi merupakan bukti autentik yang akan memberikan kekuatan nyata dan empiris tentang data yang diperoleh.

Data yang ingin diperoleh dari dokumentasi ini adalah data berupa dokumen sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang berkaitan dengan Peran Badan keswadayaan masyarakat (BKM) AMANAH dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Jambangan Surabaya.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, selanjutnya setelah penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2010:223).

Penggunaan alat bantu instrumen dalam proses pengumpulan data, menggunakan berupa : tape recorder, kamera, dan lembar catatandata (catatan lapangan). Penggunaan perangkat tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan kelengkapan dan keutuhan informasi yang diperoleh dari lapangan.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data menurut Moleong (2011: 280) adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam melakukan analisis data, dilaksanakan dalam suatu proses. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian, tahapan-tahapan untuk menganalisis data menurut Sugiyono (2011: 247-253) yaitu:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara obyektif sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pengumpulan data ini diperlukan setelah melakukan pengamatan di kelurahan Jambangan Kota Surabaya tentang peran BKM dalam penanggulangan kemiskinan.

2. Reduksi Data

Sugiyono (2010:249), Data yang diperoleh dari lapangan, dicatat secara teliti, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

3. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam hal ini Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:

249) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Conclusion (Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Umum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Amanah Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Surabaya

a. Deskripsi BKM Amanah Jambangan Kelurahan Jambangan

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang *representative*, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Pada tahun 2008 keberlanjutan pelaksanaan P2KP diperluas lagi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan)

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Amanah Jambangan adalah sebagai lembaga yang akan mengartikulasikan aspirasi masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pembangunan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Penyusunan dokumen Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) di tingkat kelurahan. BKM juga sebuah organisasi masyarakat warga yang memiliki 3 perangkat, yakni: PK-BKM, Kesekretariatan, dan Unit-Unit Pengelola. Pelayanan yang diberikan oleh BKM kepada pemetik manfaat menggunakan pendekatan (berbasis) kelompok bukan individu/ personal.

b. Visi dan Misi dan Tujuan BKM Amanah Jambangan

Visi BKM Amanah adalah mewujudkan masyarakat Jambangan yang mampu untuk hidup secara mandiri, sejahtera lahir batin dan berkesinambungan serta memiliki rasa kebersamaan yang tinggi dan di kelola oleh masyarakat.

Misi BKM Amanah adalah:

- Membangun kebersamaan dalam melakukan gerakan penanggulangan kemiskinan secara mandiri melalui peningkatan ekonomi dengan melakukan penambahan modal usaha.
- Pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan komputer guna peningkatan kemampuan pengoperasian komputer untuk mencari kerja.

B. Pembahasan

Sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk dikelurahan pada umumnya. Oleh sebab itu peran utama BKM adalah :

1. Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3tahun) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis).

Peran BKM Amanah Jambangan dalam mengorganisasikan warga secara partisipatif membawa dampak yang positif terhadap masyarakat di kelurahan jambangan, karena masyarakat lebih mudah mengetahui program yang telah dibuat pemerintah dan dengan adanya pengorganisasian tersebut BKM Amanah Jambangan membuat program yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Pengorganisasian masyarakat di BKM Amanah Jambangan dalam tautan PNPM Mandiri Perkotaan adalah upaya terstruktur untuk menyadarkan masyarakat akan kondisi yang dihadapinya, potensi dan peluang yang dimiliki. Oleh sebab itu, Cara untuk pengorganisasian warga dapat dilakukan dengan mengumpulkan warga masyarakat yang setiap RT-nya diwakili oleh ketua RT, sekertaris, bendahara dan masyarakat setempat kelurahan jambangan. Diharapkan dengan adanya perwakilan dari setiap anggota masyarakat kelurahan jambangan maka dapat di ketahui secara jelas dan transparan tentang mengapa terjadi kemiskinan dikelurahan mereka, kesadaran bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan kaum miskin, sehingga terbangun pemahaman bahwa kemiskinan adalah usaha bersama dan musuh bersama. Jadi pengorganisasian masyarakat didalam BKM Amanah Jambangan ini tidak diartikan sebagai wadah organisasi, tetapi lebih

merupakan kesepakatan bersama untuk bersatu sebagai warga disuatu kelurahan untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan sebagai suatu gerakan moral. Dengan adanya pengorganisasian tersebut BKM Amanah Jambangan dapat dinyatakan berhasil terbukti jumlah warga miskin dapat berkurang dari tahun-ketahun di kelurahan jambangan..

2. Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya ditingkat komunitas.

Peran BKM Amanah Jambangan Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan BKM Amanah Jambangan melaksanakannya secara kolektif dengan jalan musyawarah. Kegiatan ini dilakukan agar dalam pengambilan keputusan berdasarkan aspirasi semua anggota BKM bukan keputusan salah satu anggota saja. Jadi keputusan yang di ambil dapat di pertanggung jawabkan secara bersama-sama. Sebagai salah satu Contoh dari pengambilan keputusan tersebut adalah dalam perbaikan jalan adalah maka BKM memprioritaskan jalan mana yang akan diperbaiki terlebih dahulu yang sekiranya sudah menjadi penghambat dalam kegiatan masyarakat. Sebagai lembaga yang dibuat berdasarkan kesadaran bersama dalam proses penanggulangan kemiskinan, tentu dalam pengambilan keputusan juga harus dilaksanakan secara musyawarah sehingga menghasilkan keputusan yang diharapkan oleh semua pihak demi kepentingan bersama. Jika dalam pengambilan keputusan tidak ada kesepakatan maka dapat diambil dengan jalan voting. Maka dapat disimpulkan bahwa BKM sudah menunjukkan perannya sebagai dewan pengambilan keputusan yang berjalan secara efektif dan dilaksanakan secara musyawarah sehingga menghasilkan keputusan dengan baik.

3. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur yang dilakukan BKM Amanah Jambangan dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dengan baik dengan bukti segala keputusan yang diambil selalu mengedepankan nilai luhur. Nilai-nilai luhur yang dimaksud adalah nilai kejujuran, keadilan, teransparan dan demokratis.

a. Kejujuran yang dimkasud adalah semua kegiatan pemberdayaan dan proses

pengambilan keputusan harus berdasarkan nilai kejujuran, agar BKM Amanah Jambangan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat dan semua program dapat dijalankan secara sukarela oleh masyarakat setempat di kelurahan jambangan.

b. Keadilan dalam hal ini keadilan dalam menetapkan kebijakan, keadilan dalam menjawab dan memenuhi kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin.

c. Transparansi yang dilakukan BKM Amanah Jambangan pada dasarnya dapat diterapkan dengan membuka akses pada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan informasi mengenai hal-hal yang dilakukan BKM Amanah Jambangan, baik itu konsep, kebijakan, pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan. Dalam hal ini semua kegiatan dan keuangan dana bantuan yang diterima oleh BKM Amanah Jambangan harus dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas serta pihak-pihak lain secara terbuka melalui papan-papan informasi yang ada di tingkat kelurahan.

d. Demokratis, adalah sifat yang dimiliki BKM Amanah Jambangan dalam setiap kegiatan pemberdayaan dan keputusan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan masyarakat pada umumnya bukan berdasarkan keinginan pribadi.

4. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh BKM Amanah Jambangan adalah melakukan pelatihan-pelatihan. Pemberian pelatihan yang diadakan oleh BKM Amanah Jambangan bagi masyarakat kelurahan jambangan Seperti yang telah terlaksana yaitu pelatihan pembuatan kue kering dan kue basah, pelatihan daur ulang sampah menjadi dompet, tas dll, pembuatan sambun, pelatihan komputer. Tujuan pemberdayaan masyarakat miskin untuk menambah keterampilan warga, agar warga tersebut lebih kreatif dan inovatif dalam berbagai bidang dan dengan keterampilan tersebut diharapkan masyarakat dapat menghasilkan keuntungan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka khususnya masyarakat yang kurang mampu Karena dengan pemberian pelatihan tersebut dapat bermanfaat dan

dapat menghasilkan keuntungan apabila hasilnya sudah jadi dan dapat dijual sehingga dapat menambah penghasilan khususnya bagi keluarga yang kurang mampu dikelurahan jambangan kota surabaya.

5. Mengembangkan jaringan BKM di tingkat kecamatan kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarkan aspirasi masyarakat warga yang di wakilinya.

Dalam mengembangkan jaringan, BKM mempunyai kesempatan untuk melakukan kemitraan dengan berbagai pihak terbuka luas. Bahkan pemerintah telah mendorong proses berjalannya kemitraan itu sendiri dengan mengeluarkan berbagai regulasi yang mengoptimalkan lembaga perbankan nasional maupun BUMN untuk berperan serta memberikan wadah bagi berjalannya kemitraan. BKM dapat bermitra dengan siapa saja diantaranya dengan masyarakat, dengan aparat kelurahan dan dengan pemerintah daerah/kota. BKM dapat bermitra dengan masyarakat maksudnya dalam kaitannya dengan program BKM untuk penanggulangan kemiskinan BKM dapat melakukan upaya dengan sosialisai dengan cara selalu hadir dalam forum yang melibatkan RT maupun RW. Dan saat itulah BKM dapat menjelaskan program-program yang akan dilaksanakan dan artinya dengan itu BKM bermitra dengan masyarakat. Sehingga masyarakat akan tahu tentang program-program apa saja yang dibuat pemerintah dengan adanya kemitraan tersebut.

Dengan pemerintah kabupaten/kota misalnya bermitra dengan Bappemas untuk pemberian wawasan tentang program daur ulang sampah. Dengan mendatangkan narasumber dari orang-orang yang berkualitas yang tentu diharapkan program yang akan dijalankan akan menghasilkan suatu kualitas yang sangat bagus dan menjadi barang yang lebih berharga dan dapat di jual seperti tas, baju, dompet dll. Jadi dengan diadakannya seminar tentang bagaimana cara mendaur ulang sampah akan menjadi tau bahwa dengan sampah yang sebetulnya dianggap sebelah mana oleh semua orang bisa di jadikan barang-barang yang lebih berharga dan dapat mempunyai nilai jual yang tinggi. Sehingga dengan adanya kegiatan kemitraan tersebut masyarakat miskin pada khususnya dapat meningkatkan pendapatan ekonominya sendiri tanpa terus-menerus meminta bantuan kepada orang lain.

6. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat, yang sehari-hari dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan.

Dalam menetapkan kebijakan dan mengawasi pemanfaatan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang dilakukan BKM Amanah Jambangan sudah baik dengan mengalokasikan pemanfaatan dana BLM tersebut kedalam 3 bidang pembangunan yaitu bidang sosial, bidang ekonomi, bidang lingkungan.

a) Dalam bidang lingkungan, antara lain :

- 1) Perbaiki rumah penduduk miskin yang tidak layak huni untuk di renovasi
- 2) Memperlancar sarana transportasi jalan, yaitu paviginisasi dan pembuatan selokan agar tidak terjadi banjir saat turun hujan.

b) Dalam bidang Sosial, antara lain :

- 1) pelatihan-pelatihan untuk membuat kue basah dan kue kering, beserta penyajian alatnya.
- 2) pelatihan produksi daur ulang sampah
- 3) Pelatihan pembuatan sabun mandi
- 4) untuk pedagang kita buatkan rombongan .Jadi, pedagang yang rombongnya sudah tidak layak, di perbaiki oleh BKM Amanah Jambangan.

c) Dalam bidang ekonomi, antara lain :

- 1) Meningkatkan pendapatan warga kurang mampu, yaitu dengan cara Pinjaman ekonomi bergulir, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan sehingga di hentikan.

Dari semua pelaksanaan kegiatan 3 bidang tersebut menggunakan bantuan dana atau yang disebut dengan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya. BLM yang diberikan pada masyarakat dalam pembangunan infrastuktur bagi masyarakat tersebut mempunyai komposisi 70% dari total biaya yang dibutuhkan, dan dana yang 30% berasal dari swadaya oleh masyarakat itu sendiri. Hal itu dikarenakan dana BLM bersifat stimulan bagi masyarakat untuk mencoba melaksanakan apa yang sudah masyarakat rencanakan melalui rencana tahunan dan perencanaan jangka menengah tahunan dengan lebih memprioritaskan kepentingan bersama dan

keberpihakan pada masyarakat miskin. Untuk itu penggunaan dana BLM lebih diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan kolektif dan menyentuh langsung pada masyarakat miskin.

Penggunaan dana BLM pada dasarnya dana BLM dapat digunakan secara cukup luwes dengan berpedoman kepada PJM Pronangkis, pembelajaran aspek Tridaya (pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan sosial) dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di kelurahan/desa bersangkutan. Secara singkat ketentuan penggunaan dana BLM bagi komponen sosial dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- a. Komponen kegiatan yaitu komponen sosial yang merupakan kegiatan sosial/unsur sosial yang akan dilaksanakan oleh BKM Amanah Jambangan melalui kesepakatan bersama warga.
- b. Sifat kemanfaatan kegiatan yaitu : kegiatan yang secara langsung mampu menumbuhkan kembali modal sosial di masyarakat seperti terjalannya kembali budaya gotong royong, tolong menolong antar warga, integritas, etos kerja kewirausahaan dan lain-lain. Selain itu seluruh ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan sosial ini harus sesuai menurut kesepakatan warga dan tertuang dalam kebijakan BKM.
- c. Contoh jenis kegiatan yang dibiayai BLM yaitu: pelatihan KSM untuk pengembangan kapasitas/penguatan organisasi. Penyiapan dan penciptaan peluang usaha melalui pelatihan dan praktek ketrampilan usaha bagi warga-warga miskin yang belum produktif. Selain itu program sosial yang sifatnya bantuan yang diupayakan berkelanjutan seperti program peningkatan gizi balita, program penuntasan wajib belajar sembilan tahun, dll.
- d. Status dana BLM yaitu; sebagai dana stimultan dan diharapkan dapat menggugah partisipasi warga lainnya untuk ikut dalam gerakan amal bagi kaum miskin.

PNPM Mandiri Perkotaan melarang dana BLM dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, menimbulkan dampak keresahan sosial berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum, serta

peraturan yang berlaku. Secara umum beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll).
2. Kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjata dan sejenisnya).
3. Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank.
4. Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya.
5. Pembebasan lahan.
6. Pembangunan rumah ibadah.
7. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor BKM.
8. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-lain yang dilarang dalam *safeguard*.
9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai, agama, tatasusila, dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai universal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab pembahasan sebelumnya menyimpulkan bahwa skripsi ini dengan judul "Peran Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya". Maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Amanah Jambangan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama dibidang ekonomi. Adanya pelatihan-pelatihan, pinjaman bergulir, pengadaan rombongan dagang dan bedah rumah warga miskin dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
2. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Amanah Jambangan memberikan beragam keterampilan yang hasilnya menjadikan masyarakat kelurahan jambangan lebih kreatif dan inovatif. Sehingga secara tidak langsung dengan adanya keterampilan tersebut dapat mensejahterakan kehidupan warga miskin dikelurahan jambangan.
3. Hambatan yang dihadapi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Amanah Jambangan dalam penanggulangan kemiskinan dikelurahan Jambangan adalah keterbatasan kemampuan pegawai dan pengurus dalam pengelolaan manajemen keuangan, minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan

- BKM Amanah Jambangan, dan macetnya Pembayaran pinjaman bergulir.
4. Semua peran yang dilakukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tidak lepas dari upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Sehingga upaya yang dilakukan diantaranya:
 - a. Dengan dilakukan penyuluhan dan sosialisasi diberbagai form yang ada dimasyarakat tentang program-program BKM
 - b. Memberikan berbagai pelatihan kepada masyarakat sehingga mempunyai keterampilan seperti pelatihan program daur ulang sampah, pelatihann pembuatan kue kering dan kue basah, dan palatihan membuat sabun.
 - c. Melibatkan pemerintah kelurahan dalam penarikan kredit macet dalam pembayaran pinjaman bergulir.

Dalam hal ini Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Amanah Jambangan memberikan respon positif. Ini dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan BKM dalam penanggulangan kemiskinan dikelurahan Jambangan Kota Surabaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Peran Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan DiKelurahan Jambangan Kota Surabaya, maka penulis akan menyajikan beberapa saran sebagai berikut :

1. BKM Amanah Jambangan diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Memaksimalkan Peran BKM dalam mengembangkan jaringan dengan pihak lain agar menambah kemajuan di wilayahnya.
3. Guna mengatasi pinjaman macet maka BKM sebaiknya melalukan sesuai pengawasan dan pendampingan terhadap KSM.
4. Masyarakat kelurahan jambangan meningkatkan pertispasinya dan lebih kreatif dalam berbagai kegiatan yang telah ditetapkan BKM sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
5. Mengikut sertakan masyarakat miskin untuk ikut terlibat dalam program yang akan dilaksanakan BKM Amanah Jambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soemitro, Sutyastie & Tjiptoherijanto Prijono, 2002. *Kemiskinan Dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabet
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia : menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suyanto, Bagong & Karnaji, 2005. *Kemiskinan dan kesenjangan ketika pembangunan tak berpihak rakyat*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suyanto, Bagong, 2013. *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya*. Malang : Intrans Publishing.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady A. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia, transisi menuju demokratis*. Yokyakarta : Pustaka Pelajar
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2010. *Modul Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri* . Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya